

## SISTEM PUSAT-PUSAT PERMUKIMAN DI KOTA MANADO MENGGUNAKAN INDEKS SENTRALITAS TERBOBOT

Lucy Juliana Wagey<sup>1</sup>, Sonny Tilaar<sup>2</sup>, Eslie Takumansang<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa S1 Program Studi Perencanaan Wilayah & Kota Unsrat, <sup>2&3</sup>Staf Pengajar Jurusan Arsitektur, UnsratE-mail:[Lucywagey@gmail.com](mailto:Lucywagey@gmail.com)

### ABSTRAK

Kota Manado sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Utara dijadikan sebagai Pusat Kegiatan Nasional memiliki laju pertumbuhan penduduk yang pesat sehingga dalam penentuan fungsi kawasan perlu memperhatikan kelengkapan pembangunan fasilitas. Lokasi dalam penentuan pusat permukiman terletak pada 10 Kecamatan bagian daratan Kota Manado. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi ketersediaan sarana untuk mengetahui sebaran permukiman, selain itu menganalisis sistem pusat-pusat permukiman. Analisis ini memakai metode spasial dan metode kombinasi (kuantitatif-kualitatif) dengan 4 analisis yaitu skalogram, indeks sentralitas, aksesibilitas, dan gravitasi. Berdasarkan penelitian ini, Kelurahan Wenang Utara dan Kelurahan Malalayang II, memiliki ketersediaan sarana yang cukup banyak dibandingkan kelurahan lain, sedangkan berdasarkan hasil 4 analisis disetiap kecamatan memiliki pusat pelayanan kawasan, pusat pelayanan lingkungan, dan beberapa sub pusat pelayanan kawasan tersendiri.

**Kata Kunci:** Pusat Permukiman, Ketersediaan, Sarana, Hirarki

### ABSTRACT

*Manado City as the capital city of North Sulawesi Province is used as a National Activity Center which has a rapid population growth rate so that in paying attention to the function of the area it is necessary to pay attention to the completeness of development facilities. The location in determining the center of settlement lies in 10 districts of the mainland city of Manado. The purpose of this study is to identify the availability of means to determine the distribution of settlements, besides analyzing the system of settlement centers. This analysis uses a spatial method and a combination method (quantitative-qualitative) with 4 analyzes namely scalogram, index centrality, accessibility, and gravity. Based on this research, Wenang Utara Sub-District and Malalayang II Sub-District, have quite a lot of facilities available compared to other kelurahans, while based on the results of 4 analyzes each sub-district has a regional service center, an environmental service center, and several regional service sub-centers.*

**Kata Kunci:** Settlement Center, Availability, Facilities, Hierarchy

### PENDAHULUAN

Kota Manado adalah ibukota Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki laju pertumbuhan penduduk yang cukup pesat ditandai dengan jumlah penduduk di Kota Manado pada tahun 2014 sebesar 430.790 jiwa, bertambah sebesar 44.767 jiwa pada tahun 2020 (sumber BPS Kota Manado), dengan luas permukiman Kota Manado tercatat sebesar 392,40 ha dan kepadatan penduduk sebesar 2.926 jiwa/km<sup>2</sup> (sumber data Kementerian Dalam Negeri tahun 2020).

Dengan laju pertumbuhan 0,37/tahun (Sumber : Publikasi Provinsi Sulawesi Utara Dalam Angka) dan pemulihan dari pandemi covid- 19 pada tahun 2022 membuat Kota Manado menjadi kota yang berkembang lebih cepat, untuk itu ditetapkan dalam RTRWN dan RTRW Kota Manado Tahun 2014-2034 dalam sistem pusat pelayanan kota menjadikan Kota Manado sebagai pusat kegiatan nasional (PKN) dalam upaya mendukung perkembangan Kota Manado pada kegiatan pariwisata, perdagangan dan jasa. Dalam perkembangan Kota Manado, pusat-pusat

permukiman yang ditetapkan oleh pemerintah daerah terdiri atas pusat pelayanan kawasan (PPK), pusat pelayanan lingkungan (PPL), serta pusat kegiatan lainnya dengan hirarki lebih tinggi yang memperhatikan distribusi penduduk dan kelengkapan fasilitas.

Beberapa pusat pelayanan di Kota Manado telah diarahkan dalam RTRW Kota Manado tahun 2014-2034 dengan informasi data yang digunakan sebelum tahun 2014, mengingat Kota Manado sebagai wilayah urban terbesar di Kawasan Timur Indonesia Bagian Utara (sumber : DPMPSTSP) maka telah terjadi perkembangan kota yang signifikan dan pusat-pusat pelayanan telah mengalami peningkatan dalam mawadahi penduduk kota. Untuk itu peneliti ingin menganalisis mengenai struktur perkotaan pada lokasi 10 Kecamatan di Kota Manado bagian darata, dengan tujuan untuk mengidentifikasi ketersediaan fasilitas dalam mengetahui sebaran permukiman, serta menganalisis sistem pusat-pusat permukiman di Kota Manado.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Hirarki Wilayah dan Pusat-Pusat Permukiman Perkotaan

Kota Manado dengan fungsi yang telah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), memiliki beberapa kriteria dengan struktur wilayah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2021, terdiri dari Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), Sub Pusat Pelayanan Kawasan (SPPK), dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

### Analisis Struktur Pusat Permukiman

Struktur pusat permukiman mendeskripsikan fungsi kawasan dengan berdasarkan pada Permen ATR/BPN 11 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi, Kabupaten, Kota dan RDTR yang terdiri dari beberapa analisis, namun peneliti hanya mengambil 4

Analisis mengingat keterbatasan dan waktu penelitian, yaitu sebagai berikut.

**Analisis Skalogram**, analisis ini digunakan dalam menentukan pusat permukiman berdasarkan banyaknya jenis unit fasilitas dengan asumsi wilayah dengan peringkat tertinggi bisa ditetapkan menjadi pusat permukiman.

**Analisis Indeks Sentralitas**, dimaksudkan untuk mengetahui seberapa banyak fungsi yang ada dalam wilayah permukiman.

**Analisis Aksesibilitas**, digunakan untuk mengetahui kemudahan dari wilayah asal ke wilayah yang berdekatan.

**Analisis Gravitasi**, digunakan untuk menghitung kekuatan interaksi antar wilayah atau mengukur kekuatan keterkaitan antara pusat kegiatan dengan pusat wilayah lainnya, jika nilainya lebih besar maka semakin erat daya tarik hubungan kedua wilayah.

## METODOLOGI

Dalam penelitian ini menggunakan 2 metode yaitu metode spasial dan metode kombinasi (kuantitatif-kualitatif), dengan 4 analisis yaitu Analisis Skalogram, Analisis Indeks Sentralitas, Analisis Aksesibilitas, dan Analisis Gravitasi. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu observasi lapangan dan studi dokumen.

Penelitian ini mencakup 3 variabel yaitu Fasilitas yang terbagi fasilitas sosial, fasilitas ekonomi, dan fasilitas pemerintahan yang digunakan untuk melihat ketersediaan sarana dalam mengetahui sebaran permukiman pada Kota Manado; Penduduk dengan parameter jumlah digunakan dalam melengkapi data perhitungan analisis aksesibilitas dan analisis gravitasi; dan Jarak digunakan dalam melengkapi data perhitungan pada analisis aksesibilitas dan analisis gravitasi sebagai analisis tambahan dalam menentukan pusat permukiman.

Metode spasial dipakai untuk melihat ketersediaan sarana pada Kota Manado, sedangkan metode kombinasi (kuantitatif-kualitatif) digunakan dalam menentukan pusat permukiman dengan beberapa rumus dalam tahap analisis

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada pada Kota Manado yang terletak di ujung Pulau Sulawesi sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Utara dengan setiap kelurahan pada 10 Kecamatan bagian Kota Manado daratan dari 11 Kecamatan sebagai tempat penelitian dalam menentukan pusat permukiman. Kota Manado sendiri memiliki luas wilayah 157,26 km<sup>2</sup>, kepadatan penduduknya mencapai 2.787,95 jiwa/Km<sup>2</sup> (sumber: BPS Kota Manado 2023)



**Gambar1.**Peta Deliniasi Kota Manado  
Sumber: Google Earth, 2023

### Analisis Ketersediaan Fasilitas (Sarana) Penunjang Permukiman Di Kota Manado

Sarana perkotaan yaitu sarana yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan permukiman meliputi pendidikan, kesehatan, perekonomian, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, serta sarana penunjang kehidupan sosial lainnya dalam kawasan perkotaan, tertulis dalam pedoman kriteria teknis penataan ruang kawasan budidaya oleh Badan Litbang Departemen Pekerjaan Umum. Pada tabel dibawah ini merupakan ringkasan data dengan total ketersediaan 5 sarana pada setiap kelurahan yang telah dijumlahkan pada setiap kecamatan.

**Tabel 1.** Ketersediaan Sarana Pendidikan Kota Manado

Kecamatan	TK	SD	SMP	SMA	PT
Bunaken	8	13	8	5	1
Malalayang	26	26	8	8	13
Mapanget	35	24	11	10	3
Paal Dua	17	25	10	6	6
Sario	7	13	6	4	2
Singkil	11	23	9	5	0
Tikala	10	16	8	16	1
Tuminting	12	38	9	9	2
Wanea	13	36	15	9	6
Wenang	14	45	17	15	7

Sumber: Badan Pusat Statistik Kecamatan Kota Manado, 2022

**Tabel 2.** Ketersediaan Sarana Kesehatan Kota Manado

Kecamatan	RS	Puskesmas	Praktik Dokter	Apotek	Klinik
Bunaken	0	2	0	3	0
Malalayang	4	8	5	14	0
Mapanget	2	2	4	17	3
Paal Dua	4	7	5	11	0
Sario	4	1	4	12	0
Singkil	0	3	2	7	1
Tikala	0	1	3	6	1
Tuminting	1	1	3	12	1
Wanea	4	3	3	17	0
Wenang	4	3	9	24	3

Sumber: Badan Pusat Statistik Kecamatan Kota Manado, 2022

**Tabel 3.** Ketersediaan Sarana Peribadatan Kota Manado

Kecamatan	Masjid	Gereja	Vihara	Pura	Klenteng
Bunaken	0	2	0	3	0
Malalayang	4	8	5	14	0
Mapanget	2	2	4	17	3
Paal Dua	4	7	5	11	0
Sario	4	1	4	12	0
Singkil	0	3	2	7	1
Tikala	0	1	3	6	1
Tuminting	1	1	3	12	1
Wanea	4	3	3	17	0
Wenang	4	3	9	24	3

Sumber: Badan Pusat Statistik Kecamatan Kota Manado, 2022

**Tabel 4.** Ketersediaan Sarana Perekonomian Kota Manado

Kecamatan	Pasar	Mal	Minimarket	Pertokoan	Restoran	Hotel/ Penginapan
Bunaken	3	0	5	0	1	4
Malalayang	4	1	18	6	40	42
Mapanget	4	2	41	5	57	15
Paal Dua	3	0	8	5	9	25
Sario	2	3	32	11	88	3
Singkil	3	0	3	1	2	5
Tikala	3	0	19	26	9	9
Tuminting	4	0	23	7	43	2
Wanea	6	0	28	4	42	14
Wenang	2	2	33	33	26	74

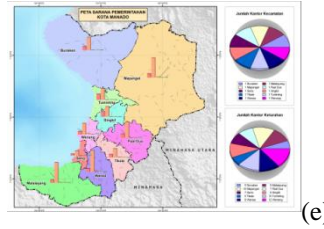
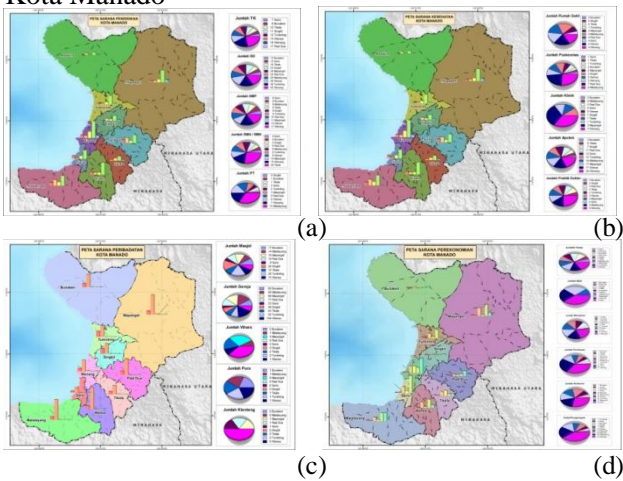
Sumber: Badan Pusat Statistik Kecamatan Kota Manado, 2022

**Tabel 5.** Ketersediaan Sarana Pemerintahan Kota Manado

Kecamatan	Kantor Kecamatan	Kantor Kelurahan
Bunaken	1	5
Malalayang	1	9
Mapanget	1	10
Paal Dua	1	7
Sario	1	7
Singkil	1	9
Tikala	1	5
Tuminting	1	10
Wanea	1	9
Wenang	1	12

Sumber: Badan Pusat Statistik Kecamatan Kota Manado, 2022

Berikut dibawah ini merupakan gambar peta dari setiap 5 sarana yang ada disetiap Kecamatan Kota Manado



**Gambar 2.** (a) Sarana Pendidikan (b) Sarana Kesehatan (c) Sarana Peribadatan (d) Sarana Perekonomian (e) Sarana Pemerintahan

Sumber: Geoportal dan Peta Citra Satelit, 2023

### Analisis Sistem Pusat-Pusat Permukiman Di Kota Manado

Dalam menentukan sistem pusat-pusat permukiman, berdasarkan berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kota Manado dan Permen ATRBPN 11 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi, Kabupaten, Kota dan RDTR peneliti menggunakan 4 analisis utama, yaitu Analisis Skalogram, Analisis Indeks Sentralitas, Analisis Aksesibilitas, dan Analisis Gravitasi. Setelah mendapatkan hasil dari masing-masing analisis, perhitungan peringkat hirarki menggunakan rumus jangkauan orde, dan untuk kelas menggunakan 3 kelas karena hasil analisis akan menentukan pusat permukiman mencakup Pusat Pelayanan Kawasan, Sub Pusat Pelayanan Kawasan, dan Pusat Pelayanan Lingkungan. Rumus jangkauan orde seperti berikut ini :

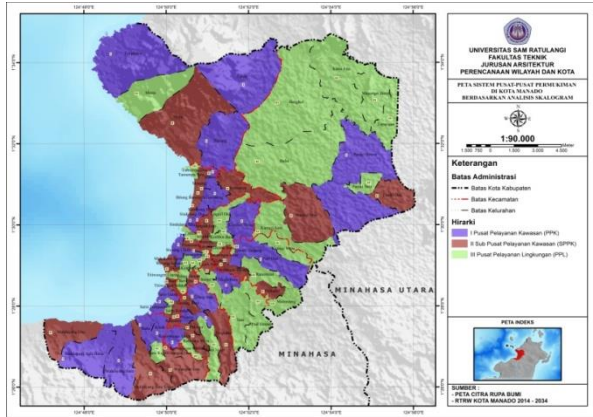
$$Jangkauan\ Orde = \frac{Nilai\ Max - Nilai\ Min}{Kelas}$$

Sumber : Edward W, 1918

### Analisis Skalogram

Pada analisis ini, fasilitas akan dikelompokkan menjadi 5 sarana, dan masing-masing unit yang memiliki fasilitas pada kelurahan akan di hitung sebagai 1 = tersedia, dan 0 = tidak tersedia disetiap kecamatan. Setelah mendapatkan total sarana dari masing-masing kelurahan dihitung peringkat hirarki menggunakan rumus jangkauan orde dengan hasil gambar peta yang telah disatukan pada satu gambar dari setiap kelurahan pada kecamatan. Pada analisis skalogram, Kelurahan Bailang, Meras, Tongkaina,

Malalayang II, Malalayang I, Bahu, Malalayang I Barat, Paniki Bawah, Paal Dua, Sario Tumpaan, Sario Utara, Kombos Timur, Tikala Baru, Sindulang I, Kampung Islam, Tuminting, Kampung Islam, Tuminting, Mahawu, Karombasan Utara, Teling Atas, Wanea, Wenang Utara, dan Lawangirung menduduki hirarki I.



**Gambar 3.** Peta Hasil Analisis Skalogram  
Sumber: Hasil Analisis, 2023

**Analisis Indeks Sentralitas**

Analisis ini merupakan turunan dari analisis skalogram dimana analisis skalogram tidak cukup dalam menentukan pusat permukiman hanya berdasarkan tersedianya fasilitas pada tiap unit dimasing-masing kelurahan (Riyadi, 2003:118), untuk menghitung frekuensi nilai sentralitas, berikut merupakan rumus yang dipakai:

$$C = \frac{t}{T}$$

Keterangan:

C = bobot dari atribut fungsional suatu fasilitas 27

t = nilai sentralitas total yaitu 100 atau 1000 (jika unit banyak)

T = jumlah total dari atribut dalam sistem

Setelah bobot tiap fasilitas didapat, maka selanjutnya dihitung Indeks Sentralitas setiap kecamatan dengan rumus :

$$C = F \times Cf$$

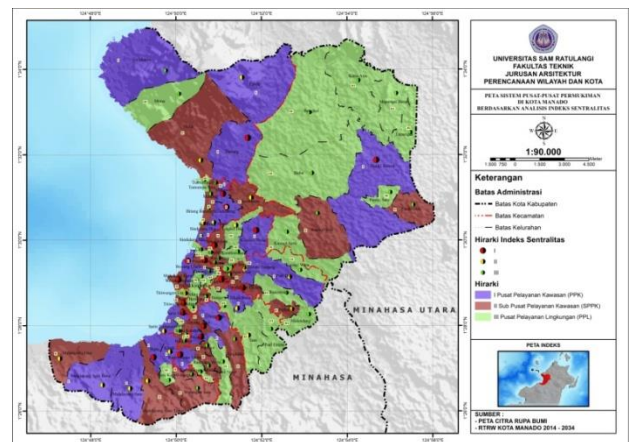
Keterangan:

F = jumlah tiap fasilitas di masing-masing

kecamatan C

f = bobot per fasilitas

Setelah mendapatkan total sarana dari masing-masing kelurahan dihitung peringkat hirarki menggunakan rumus jangkauan orde dengan hasil gambar peta yang telah disatukan pada satu gambar dari setiap kelurahan pada kecamatan. Hasil dari analisis ini adalah Kelurahan Bailang, Bahu, Paniki Bawah, Dendengan Dalam, Sario Utara, Titiwungen Selatan, Kombos Timur, Singkil Satu, Tikala Ares, Tuminting, Mahawu, Teling Atas, Wanea, Tanjung Batu, Wenang Utara, Wenang Selatan, dan Pinaesaan menduduki hirarki 1.



**Gambar 4.** Peta Hasil Analisis Indeks Sentralitas  
Sumber: Hasil Analisis, 2023

**Analisis Aksesibilitas**

Dalam menemukan kemudahan mencapai suatu wilayah, Analisis aksesibilitas memiliki perhitungan rumus yaitu :

$$Aksesibilitas = \frac{JP \text{ Kelurahan } A * JP \text{ Kecamatan}}{JKel \wedge Kondisi \text{ Jalan}}$$

Keterangan:

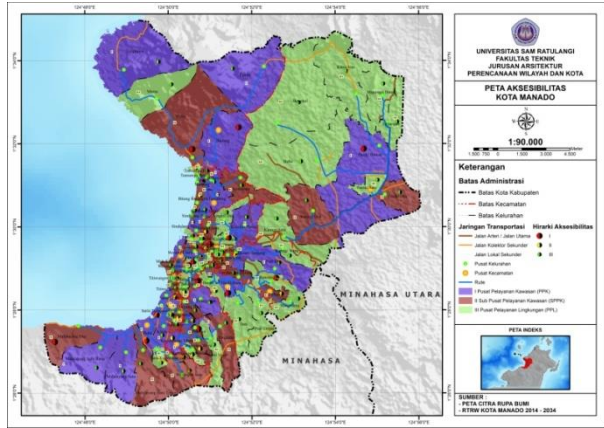
JP = Jumlah Penduduk

JKel = Jarak Kelurahan A ke Ibukota Kecamatan

Setelah mendapatkan total sarana dari masing-masing kelurahan dihitung peringkat hirarki menggunakan rumus jangkauan orde dengan hasil gambar peta yang telah disatukan pada satu gambar



dari setiap kelurahan pada kecamatan. Hasil dari analisis ini adalah Kelurahan Bailang, Molas, Malalayang II, Bahu, Paniki Bawah, Ranomuut, Sario Tumpaan, Wawonasa, Kombos Barat, Tikala Baru, Maasing, Pakowa, Teling Bawah, Mahakeret Bawah, Mahakeret Timur.



**Gambar 5.** Peta Hasil Analisis Aksesibilitas  
Sumber: Hasil Analisis, 2023

### Analisis Gravitasi

Perhitungan kekuatan interaksi antar wilayah menunjukkan jika semakin besar nilai gravitasi antar kedua wilayah, berarti daya tarik dan hubungan antar wilayah semakin erat. Kelurahan yang dipakai sebagai kelurahan 1 untuk menjadi pusat pada kecamatan tersebut adalah kelurahan yang menduduki peringkat tertinggi dari dari analisis-analisis sebelumnya. Untuk itu rumus dari analisis gravitasi yang dipakai adalah:

$$i = \frac{P1 * P2}{J}$$

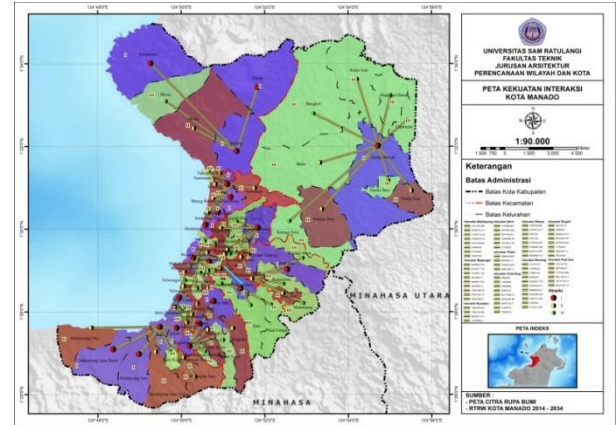
Sumber : Tarigan, 2009

Keterangan:

- i = besarnya interaksi antar kelurahan 1 dan 2
- P1 = jumlah penduduk kelurahan 1
- P2 = jumlah penduduk kelurahan 2
- J = jarak antara kelurahan 1 dan 2 (km)

Setelah mendapatkan total sarana dari masing-masing kelurahan dihitung peringkat hirarki menggunakan rumus jangkauan orde dengan hasil gambar peta yang telah disatukan pada satu gambar dari setiap kelurahan pada kecamatan. Hasil dari analisis ini adalah Kelurahan Bailang,

Molas, Pandu, Malalayang I, Bahu, Kairagi Dua, Paniki Bawah, Paniki Satu, Dendengan Dalam, Ranomuut, Sario, Sario Tumpaan, Kombos Barat, Kombos Timur, Singkil Satu, Singkil Dua, Banjer, Tikala Baru, Maasing, Mahawu, Karombasan Utara, Karombasan Selatan, Ranotana Weru, Pakowa, Teling Bawah, Mahakeret Bawah, Wenang Utara, Lawangirung menduduki hirarki I.



**Gambar 6.** Peta Hasil Analisis Gravitasi  
Sumber: Hasil Analisis, 2023

### Hasil Penentuan Pusat Permukiman

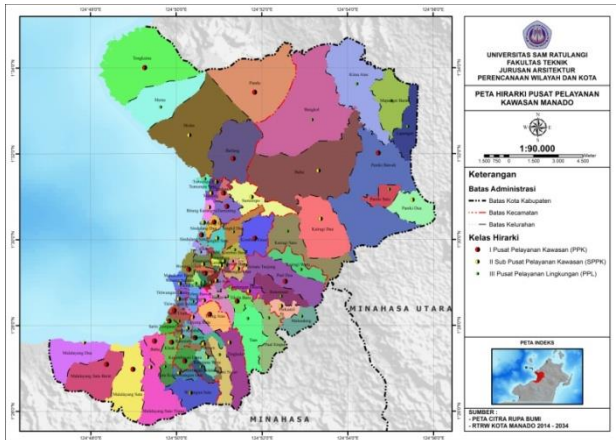
Pada hasil penentuan pusat permukiman dihitung berdasarkan hasil dari 4 analisis dengan menggunakan sistem hirarki yaitu rumus jangkauan orde dengan kelas yaitu 3 berdasarkan hasil yang akan ditentukan yaitu pusat permukiman dengan 3 kategori Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), Sub Pusat Pelayanan Kawasan (SPPK), Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

$$Jangkauan Orde = \frac{Nilai Max - Nilai Min}{Kelas}$$

Sumber : Edward W, 1918

Setelah mendapatkan hasil peringkat hirarki dari perhitungan jangkauan orde diatas, hirarki I berarti Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), hirarki II berarti Sub Pusat Pelayanan Kawasan (SPPK), dan Hirarki III berarti Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Hasil dari perhitungan diatas didapati bahwa Kelurahan Bailang, Molas, Bahu, Paniki Bawah, Dendengan Dalam, Paal Dua, Perkamil, Ranomuut, Sario Tumpaan, Kombos Timur, Singkil Satu, Banjer, Mahawu, Karombasan Utara, Wenang Utara menduduki hirarki I yang berarti menjadi Pusat

Pelayanan Kawasan (PPK) pada setiap kecamatan di Kota Manado. Berikut ini merupakan gambar peta pusat permukiman secara keseluruhan dari setiap kelurahan yang dibuat menjadi satu gambar peta.



**Gambar 7.** Peta Sistem Pusat-Pusat Permukiman  
Sumber: Hasil Analisis, 2023

## KESIMPULAN

Ketersediaan sarana pendidikan pada setiap kelurahan di Kota Manado cukup banyak, namun pada Kecamatan Bunaken khususnya tiap kelurahan hanya terdapat 1 Perguruan Tinggi yang terletak pada Kelurahan Pandu. Ketersediaan sarana kesehatan pada skala kecamatan di Kota Manado sangat minim pada sarana klinik. Ketersediaan sarana peribadatan skala kecamatan pada tiap kelurahan di Kota Manado didominasi oleh Gereja sebanyak 105 buah pada Kecamatan Wanea, dengan jumlah terbanyak berada pada kelurahan Wanea. Ketersediaan sarana perekonomian pada setiap kelurahan di Kota Manado lebih didominasi oleh 5 Minimarket pada Kecamatan Bunaken, 42 Hotel/Penginapan pada Kecamatan Malalayang, 57 Restoran pada Kecamatan Mapanget, 25 Hotel/Penginapan pada Kecamatan Paal Dua, 88 Restoran pada Kecamatan Sario, 26 Pertokoan pada Kecamatan Tikala, 43 Restoran pada Kecamatan Tuminting, 42 Restoran pada Kecamatan Wanea, 224 dan 74 Hotel/Penginapan pada Kecamatan Wenang. Berdasarkan analisis ketersediaan sarana pemerintahan disetiap kelurahan di Kota Manado sudah terpenuhi di mana setiap kelurahan memiliki

kantor lurah, dan setiap kecamatan memiliki kantor camat.

Kesimpulan empat analisis yaitu Analisis Skalogram, Analisis Indeks Sentralitas, Analisis Aksesibilitas, dan Analisis Gravitasi pada 10 Kecamatan di daratan Kota Manado, setiap kecamatan memiliki pusat permukiman yang ditandai dengan hirarki I yaitu Pusat Pelayanan Kawasan berdasarkan nilai tertinggi dari empat analisis. Pada Kecamatan Bunaken memiliki Pusat Pelayanan Kawasan pada Kelurahan Bailang dan Kelurahan Molas; pada Kecamatan Malalayang memiliki Pusat Pelayanan Kawasan pada Kelurahan Bahu; pada Kecamatan Mapanget memiliki Pusat Pelayanan Kawasan pada Kelurahan Paniki Bawah; pada Kecamatan Paal Dua memiliki Pusat Pelayanan Kawasan pada Kelurahan Dendengan Dalam, Kelurahan Kairagi Weru, Kelurahan Paal Dua, dan Kelurahan Ranomuut; pada Kecamatan Sario memiliki Pusat Pelayanan Kawasan pada Kelurahan Sario Tumpaan; pada Kecamatan Singkil memiliki Pusat Pelayanan Kawasan pada Kelurahan Kombos Timur dan Kelurahan Singkil Satu; pada Kelurahan Tikala memiliki Pusat Pelayanan Kawasan pada Kelurahan Tikala Baru; pada Kecamatan Tuminting memiliki Pusat Pelayanan Kawasan pada Kelurahan Mahawu; pada Kecamatan Wanea memiliki Pusat Pelayanan Kawasan pada Kelurahan Karombasan Utara; pada Kecamatan Wenang memiliki Pusat Pelayanan Kawasan pada Kelurahan Wenang Utara.

## SARAN

Sebagai Pusat Kegiatan Nasional dengan fungsi perdagangan dan jasa, Kota Manado khususnya pada setiap kelurahan perlu memperkuat posisi sebagai Kota Metropolitan. Fasilitas dalam perkembangan suatu kota sangat mempengaruhi kesejahteraan dan kemajuan kota tersebut, dengan demikian banyaknya sarana yang masih belum terpenuhi dapat menjadi saran berdasarkan penelitian yang diambil. Kebijakan dalam setiap tindakan pemerintah Kota Manado akan menentukan masa depan dari kota ini, khusus setiap kelurahan

yang ada. Sehingga masukan lainnya, agar pemerintah bukan hanya memperhatikan Kota Manado secara makro, tetapi bisa memenuhi kebutuhan dan pelayanan kota pada masyarakat secara mikro pada setiap kelurahan yang ada dan untuk mewujudkan hal itu perlu adanya dukungan dari masyarakat seperti menjaga fasilitas kota bersama, dan membantu pemerintah baik melalui ide maupun mengikuti setiap program yang pemerintah buat.

### DAFTAR PUSTAKA

- Asoka, Gilbert W.N. et. Al. (2013). *Effects of Population Growth on Urban Infrastructure and Services : A Case of Eastleigh Neighborhood Nairobi, Kenya*. Journal of Anthopology & Archaeology. June 2013 00. 41-56
- Badan Pusat Statistik Kota Manado, 2023.  
Bappeda Kabupaten Blora. (2013). *Batas Wilayah Kabupaten Blora*. Pemerintah Kabupaten Blora. 2013. Blora Dalam Angka 2013. BPS dan Bappeda Blora.
- Blakely, Edward J. 1994. *Planning Local Economic Development: Theory and Practice*. Sage Publications.
- Budihardjo, Eko. (1984). *Sejumlah Masalah Permukiman Kota*. Bandung : Alurni
- Carrothers, G. P. 1956. *A Historical Review of the Gravity and Potential Concepts of Human Interaction*. Journal of the American Institute of Planners.
- Conyers, D. and P. Hills. (1984). *An Introduction to Development Planning in the Third World*. Chichester: John Wiley and Sons.
- Daerah, P. (2008). *Paten No. Perda No 5 Tahun 2008 tentang RTRW Kabupaten Temanggung*
- Dias, R. d. (1997). *Studi Analisis Penentuan Lokasi Ibukota Kabupaten dati II Pekalongan*. Bandung: TA Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota ITB. <http://perkotaan.bpiw.pu.go.id/v2/sistem-perkotaan-nasional> diakses pada tanggal 29 Oktober 2022
- Dias, Rosanno dan Dippos, N. Simanjuntak. (1997). *Studi Analisis Penentuan Lokasi Ibukota Kabupaten dati II Pekalongan*, Tugas Akhir Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Bandung, Bandung.
- Edward W, P. (1918). *On the Range of a Fourth-Order Linear Differential Equation*. The Quarterly Journal of Pure and Applied Mathematics. 49 (195): 375–392.doi : 10.1080/14786441509459149
- Inmendagri nomor 34 tahun 1986 tentang Pelaksanaan Permendagri nomor 7 tahun 1986 tentang Batas-batas Wilayah Kota Di Seluruh Indonesia
- Kamus Tata Ruang Tahun 2007
- Koestoer (1995) *Evaluasi Sumber Daya Lahan*. Univeresitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Lutfi, M. (2015). *Teknik Analisa Regional Untuk Perencanaan Wilayah, Tata Ruang Dan Lingkungan*. Badan Penerbit Fakultas Geografi : Universitas Gajah Mada. Yogyakarta. ISBN : 987-979-8786-53-2
- Parson, Edward W. (1918). *"On the Range of a Fourth-Order Linear Differential Equation"*. *The Quarterly Journal of Pure and Applied Mathematics*. 49 (195): 375–392. doi:10.1080/14786441509459149.
- Parwata. (2004). *Elemen Permukiman*. University Press.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 11 Tahun 2021 Tentang : Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota Peraturan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2014 tentang RTRW Kota Manado Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Tahun 2014-2034
- Priyambodo, Dwiky and , Drs. Agus Endro S, M.Si. (2015). *Pengaruh Kompetensi, Independensi, Pengalaman Kerja Dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit Dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik Di Surakarta Dan Yogyakarta)*. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Rapoport, A. (1977). *Human Aspects of Urban Form : Towards a Man Environment Approach to Urban Form and Design*, Pergamon press Ltd,



*Headington Hill Hall, Oxford*

Robinson Tarigan. (2009). *Perencanaan pembangunan wilayah, Edisi Revisi*. Bumi Aksara, Jakarta.

Riyadi. 2003. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Edisi ke Tiga. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Sugiyono. (2013). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta

Sujarto, Djoko. (1989). *Faktor Sejarah Perkembangan Kota Dalam Perencanaan Perkembangan Kota*. Bandung : Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan ITB.

Sumaatmaja, N. (1988). *Studi Geografi Pendekatan dan Analisa Keruangan*. Bandung: Alumni.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Undang-Undang No 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman.